

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN WONOGIRI
(Studi Kualitatif pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri)**



**Oleh
Bayu Panji Laksita
NIM. 13520153**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN WONOGIRI**
(Studi Kualitatif pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Wonogiri)

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Menempuh Gelar Sarjana
Jenjang Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2018**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Hari : Senin
Tanggal : 09 April 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN


Drs. Y.B. Widyo Hari Murdianto, M.Si
Ketua/Penguji/Pembimbing



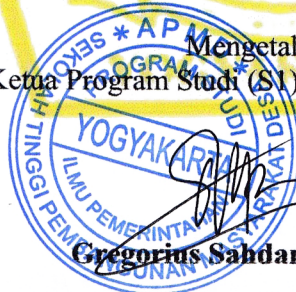
Dra. Tri Daya Rini, M.Si
Penguji Samping I



Drs. Sumarjono, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan



Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Q.S. Ar.Ra'd : 11)

Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S. Al Insyirah : 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Studi S1 Ilmu Pemerintahan di STPMD “AMPD” Yogyakarta. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Sudarno dan Ibu Subarni yang telah memberikan dukungan penuh dalam segala hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kakak saya Restu Ageng Safitri yang telah memberikan dorongan serta semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
3. Teman-teman kelompok KKN di Nglinggo Timur, Rizki Fadhilah, Dian Wahyu, Setiawan, Asti, Crisna, dan Arto Rato yang telah menjadi teman seperjuangan baik suka maupun duka.
4. Seluruh informan penelitian di Kabupaten Wonogiri yang telah memberikan informasi pada saat penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Wonogiri (Studi Kualitatif pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri)”** sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD-APMD Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu secara khusus pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat,

1. Habib Muhsin, S.Sos., M.Si, Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan tugas serta ijin penelitian.
2. Drs. YB Widyo Hari Murdianto, dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membimbing penyusunan skripsi ini sampai selesai.
3. Bapak/Ibu Dosen STMP “APMD” Yogyakarta, yang telah memberi ilmu yang bermanfaat kepada penulis di jurusan S1 Ilmu Pemerintahan dan memberikan bimbingan sehingga tersusunnya skripsi ini.
4. Staff dan karyawan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri
5. Pengelola Obyek Wisata di wilayah penelitian Kabupaten Wonogiri
6. Masyarakat dan pengunjung wisata yang menjadi responden penelitian.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya ucapkan terima kasih.

Sebagai akhir kata dengan segala keterbatasan hati penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan dari pembaca. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Kebijakan	8
2. Tinjauan Pariwisata	15
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Obyek Penelitian	34
3. Subyek Penelitian	35
4. Teknik Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisa Data	36
6. Triangulasi Data	37
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Deskripsi Wilayah	
1. Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri	38

2. Kondisi Kependudukan	38
3. Potensi Daerah	39
4. Kebijakan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Wonogiri	40
5. Perkembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.....	44
B. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	
1. Sejarah Singkat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	45
2. Tugas dan Fungsi	47
3. Sumber Daya SKPD	52
4. Susunan Organisasi.....	55
BAB III ANALISA DATA	
A. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	56
B. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Kependudukan Kab. Wonogiri Tahun 2012-2016	36
Tabel 2.2	Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 2.3	Pegawai Berdasarkan Golongan.....	53
Tabel 2.4	Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	53
Tabel 2.5	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 5.6	Pegawai Berdasarkan Lama Bekerja	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Periwisata	52
------------	---	----

INTISARI

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk memperbaiki pengembangan sektor Pariwisata salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pasal 16 dalam PP tersebut dituangkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata antara lain: norma agama dan adat istiadat, informasi yang akurat, pelayanan, kenyamanan dan kesehatan, serta kebersihan lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri?; dan 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri?, atas dasar tersebut maka peneliti mengambil judul skripsi “KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN WONOGIRI (STUDI KUALITATIF PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI)”

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan obyek Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pariwisata sebagai Sarana Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonogiri. Subyek penelitian antara lain : staff BAPEDA dan LITBANG Kabupaten Wonogiri; staff Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri; masyarakat di sekitar obyek wisata 5 orang; Wisatawan 5; dan pelaku usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, teknik dokumentasi; serta penelusuran data online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pengembangan Pariwisata di Wonogiri dapat dijelaskan sebagai berikut. (a) Pihak pengelola tempat wisata sudah memenuhi peraturan pemerintah untuk menjaga dan menghormati norma, nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, namun masih ada kasus-kasus yang dilanggar; (b) Pihak pengelola belum memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sehingga masyarakat masih ada yang kebingungan terutama dalam mengakses lokasi wisata; (c) Pihak pengelola sudah memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; (d) Pihak pengelola sudah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan, sehingga pengunjung sudah merasa nyaman berada di tempat wisata; (e) masyarakat belum mempunyai kesadaran yang tinggi tentang memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya di tempat wisata sehingga masih banyak ditemui sampah-sampah yang berserakan; 2) Faktor penghambat dan pendukung dalam perkembangan pariwisata di Wonogiri adalah sebagai berikut: (a) Faktor Penghambat antara lain: persaingan antar daerah tujuan wisata, sarana dan prasarana yang kurang memadai, globalisasi, dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata; (b) Faktor Pendukung antara lain : harga tiket lebih murah, potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, fisiografis wilayah yang strategis, serta adanya dukungan masyarakat.

Kata kunci: kebijakan, pemerintah, pengembangan, pariwisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu yang didukung berbagai fasilitas untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara (Ismayanti, 2010:3).Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang di sektor pariwisata. Pariwisata memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan suatu daerah atau negara. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan suatu daerah ke daerah lainnya. Industri pariwisata juga memberi andil dalam pembangunan sosial dan ekonomi, baik itu di Negara maju maupun berkembang.

Dalam mengembangkan pariwisata, Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Di antaranya, yang utama adalah infrastruktur, konektivitas dan transportasi terutama bandara yang bertaraf internasional agar penerbangan dapat langsung dari negara sumber pasar wisman ke destinasi di tanah air dan pelabuhan laut yang dapat disandari kapal pesiar. Selain itu, kualitas produk wisata Indonesia yang masih belum berkembang sesuai dengan keinginan pasar. Dalam upaya pengembangan pariwisata di Indonesia, pemerintah membuat beberapa kebijakan tentang pariwisata, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian;
9. Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

Kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia, dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan. Pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di mancanegara menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Berikut disajikan data kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah definisi kunjungan wisatawan asing per Januari 2016. Maka terjadi peningkatan tajam antara tahun 2016 dan 2015.

Tabel 1.1
Kunjungan Wisatawan Asing di Indonesia, 2013-2016

Bulan	Tourist Arrivals 2013	Tourist Arrivals 2014	Tourist Arrivals 2015	Tourist Arrivals 2016
Januari	614,328	753,079	723,039	814,303
Februari	678,415	702,666	786,653	888,309
Maret	725,316	765,607	789,596	915,019
April	646,117	726,332	749,882	901,095
Mei	700,708	752,363	793,499	915,206
Juni	789,594	851,475	815,148	857,651
Juli	717,784	777,210	814,233	1,032,741
Augustus	771,009	826,821	850,542	1,031,986
September	770,878	791,296	869,179	1,006,653
Oktober	719,900	808,767	825,818	1,040,651
November	807,422	764,461	777,976	
Desember	766,966	915,334	913,828	
Total	8,802,129	9,435,411	9,729,350	

Sumber: <https://www.indonesia-investments.com/>

Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati obyek-obyek spesifik yang berbasis lingkungan merupakan signal tingginya permintaan akan wisata agro. Agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai obyek wisata, baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertaniannya maupun kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Kegiatan agrowisata bertujuan untuk memperluas wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, dapat meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya.

Sebagai negara agraris, kondisi tanah dan iklim di wilayah Indonesia sangat sesuai untuk pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut dengan menerapkan sistem pengelolaan lahan yang sesuai. Komoditas pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai wisata agro.

Sumbangan sektor pariwisata yang signifikan terhadap pendapatan daerah merupakan harapan yang ingin diwujudkan daerah-daerah lainnya di Indonesia termasuk 3 (tiga) kabupaten yang memiliki keunikan bentang alam karst sehingga memiliki potensi wisata pantai dan goa yang besar, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Pacitan. Data statistik kepariwisataan menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri dalam posisi tertinggal dibandingkan kabupaten tetangga tersebut. Keadaan tersebut tentu kurang ideal mengingat Kabupaten Wonogiri juga memiliki potensi wisata waduk dan wisata pegunungan. Hal ini menjadi salah satu alasan diadakannya penelitian di sektor pariwisata Kabupaten Wonogiri dari segi pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri telah berusaha mengembangkan kepariwisataannya dengan desain strategi pembangunan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 – 2014 yang meliputi: (1) Pengembangan produk wisata yang mengarah pada tema “berwisata di alam bersama keluarga”; (2) Pengembangan keanekaragaman produk wisata dan harga; (3) Pemanfaatan teknologi

informasi bagi promosi dan informasi pariwisata Kabupaten Wonogiri; (4) Pengembangan citra pariwisata Kabupaten Wonogiri (image development); (5) Eksplorasi pasar potensial dan pemeliharaan pasar yang telah ada; (6) Meningkatkan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata; (7) Meningkatkan fungsi koordinasi pengelolaan pariwisata Kabupaten Wonogiri; (8) Meningkatkan kualitas pendidikan khusus kepariwisataan; (9) Meningkatkan daya tarik bekerja di sektor pariwisata Kabupaten Wonogiri; serta (10) Pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sesuai dengan kebutuhan.

Kurniawati (2013) menjelaskan beberapa prinsip yang menjadi acuan pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) terdiri dari: (1) Pembangunan pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, dengan ide yang melibatkan masyarakat lokal juga dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal; (2) Pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang; (3) Pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan eksploitasi. Efisiensi pengelolaan obyek wisata perlu diperhatikan.

Pemilihan obyek wisata yang mendapat prioritas untuk dikembangkan seharusnya memperhitungkan aspek ekonomi wilayah, aspek social dan aspek lingkungan. Suatu obyek wisata yang berada atau dekat dengan wilayah berkembang umumnya memiliki aksesibilitas dan sarana prasarana lebih baik dibandingkan obyek wisata pada wilayah belum berkembang. Hal ini sejalan dengan pendapat Fandeli (1995) yang menyatakan bahwa aspek penawaran pariwisata, yaitu (1) Atraksi (daya tarik), maksudnya objek wisata harus mempunyai daya tarik berupa alam atau budaya yang layak dijual ke pasar

wisata, (2) Amenitas (fasilitas), maksudnya adalah segala macam fasilitas penunjang perkembangan pariwisata berupa hotel, fasilitas umum, (3) Aksesibilitas (bisa dicapai), maksudnya adalah sarana dan prasarana yang menyebabkan wisatawan dapat mengunjungi objek wisata perlu diperhatikan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk memperbaiki pengembangan sektor Pariwisata salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/ 001751 perihal hasil klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 dan penyesuaian Jenis Usaha Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu diubah, sehingga membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu pasal 16 terdapat beberapa poin penting yang berhubungan dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Wonogiri antara lain: menjaga dan menghormati norma, nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat (**Poin a**); memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab (**Poin b**); memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif (**poin c**); memberikan kenyamanan,

keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan (poin d); memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya (**poin m**).

Kelima poin tersebut merupakan ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan masyarakat, sebab perkembangan pariwisata tidak lepas dari peran serta masyarakat sebagai subyek. Dengnoy dalam Nugroho dan Aliyah (2013) menyatakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan berbagai stakeholders pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk: 1) memberdayakan masyarakat; 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial budaya dari pembangunan pariwisata; 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat. Oleh karena itu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menuntut koordinasi dan kerja sama serta peran yang berimbang antara berbagai unsur stakeholders termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan diantara para pihak (*stakeholders*) terkait tersebut. Dalam hal tersebut masyarakat setempat harus disadarkan atas potensi yang dimiliki sehingga mereka mempunyai rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) terhadap beraneka sumber daya alam dan budaya sebagai aset pembangunan pariwisata.

Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mendukung perkembangan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan

secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu: (1) memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, (2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, (3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang didapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif (Demartoto, 2009 :100)

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengangkat judul tentang **“Kebijakan Pemerintah tentang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonogiri”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Wonogiri?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2008. *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dwidjowijoto, nugroho Riant. 2006. *Kebijakan publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- I Gede Pitana., 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Penerbit Erlangga
- Islamiy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (Cetakan Ketiga Belas, Novemberi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismayanti. 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Narbuko,Cholid. 2008 . *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology jilid 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo Oka (1997)
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2016 tentang *Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri*
- Peraturan Bupati wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Susunan, Kedudukan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri*
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri*

Proyeksi Penduduk BPS Kab. Wonogiri tahun 2016.

Suandi, I Wayan. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1. No. 1 Tahun 2010

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta

Tachjan. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung-Luslit KP2W Lemlit Unpad

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 *Tentang Kepariwisata*

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S.A. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Surabaya : Bayu Media

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta : Buju Kita